

**ANALISIS KOMPARASI PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
DENGAN FISCAL TREND MONITORING SYSTEM (FTMS) DALAM
MENGUKUR KESESUAIAN KAPASITAS APBD TERHADAP
TUNTUTAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN**

Dewi Fortuna

NPP. 32.0518

Asdaf Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: dena.chan48@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. H. Maisondra, SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed, M.AP, M.Han

E-mail: maisondora05@yahoo.co.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The fiscal capacity map is static and lacks the ability to detect trends and long-term fiscal risks, making it necessary to compare it with the more dynamic and diagnostic Fiscal Trend Monitoring System. **Purpose:** This study aims to analyze the comparison between the Regional Fiscal Capacity Map (KFD) and the Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) method in measuring the suitability of the capacity of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the demands of the community in Klaten Regency. **Method:** The method used in this study is a mixed methods approach, combining both qualitative and quantitative techniques. Data collection was carried out through interviews, documentation, and analysis of fiscal data and indicators. The qualitative data was analyzed through three stages: codification, presentation, and drawing conclusions, while the quantitative data was processed using descriptive statistical analysis to support the interpretation and comparison between the KFD Map and FTMS method. The informants in this study consisted of structural officials at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKPAD) of Klaten Regency. **Result:** The results of the study showed that there was a difference between the results of the analysis based on the KFD Map and the FTMS method. The KFD map provides an overview of fiscal capacity that is aggregative, while FTMS is able to describe regional financial conditions in more detail through financial and environmental indicators. The FTMS analysis shows a mismatch between fiscal capacity and public demands, especially in terms of per capita spending and debt ratios. **Conclusion:** This study concludes that the implementation of FTMS can be an effective tool in analyzing regional financial conditions as a whole and providing the basis for formulating fiscal policies that are more responsive to the needs of the community. Thus, the recommendations given include strengthening fiscal capacity through optimizing Regional Original Revenue (PAD) and efficiency in budget management.

Keywords: Fiscal Capacity, Fiscal Trend Monitoring System (FTMS), Trend

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peta kapasitas fiskal bersifat statis dan kurang mendeteksi tren serta risiko fiskal jangka panjang, sehingga perlu dikomparasi dengan Fiscal Trend Monitoring System yang lebih dinamis dan diagnostik. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) dan metode Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) dalam mengukur kesesuaian kapasitas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap tuntutan masyarakat di Kabupaten Klaten. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *mixed methods*, yang menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta analisis data dan indikator fiskal. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu kodifikasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Sementara itu, data kuantitatif diolah menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendukung interpretasi dan perbandingan antara metode Peta KFD dan FTMS. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara hasil analisis berdasarkan Peta KFD dan metode FTMS. Peta KFD memberikan gambaran kapasitas fiskal secara agregatif, sedangkan FTMS mampu menggambarkan kondisi keuangan daerah secara lebih rinci melalui indikator keuangan dan lingkungan. Analisis FTMS menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal dan tuntutan masyarakat, khususnya dalam hal belanja per kapita dan rasio utang. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan FTMS dapat menjadi alat yang efektif dalam menganalisis kondisi keuangan daerah secara menyeluruh serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. **Kata Kunci:** Kapasitas Fiskal, *Fiscal Trend Monitoring System (FTMS)*, Tren

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi di bidang keuangan atau lebih dikenal dengan desentralisasi fiskal, dilihat dari sisi Pemerintah Daerah, terdapat beberapa isu utama desentralisasi fiskal yang menjadi perhatian, yaitu: kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal tersebut juga menjadi bagian penting dalam penghitungan jumlah transfer ke daerah. Selisih dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal akan diperoleh kesenjangan fiskal (*fiscal gap*), dalam hal ini menjadi patokan dalam menentukan besarnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) (Herdiyana, 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, yang tercermin dalam penguatan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sinurat, 2015). *Indonesia has its special influence on the world petroleum industry not only due to its relatively abundant resources but also to its historical influence on world petroleum fiscal regimes* (Yun et al., 2020). Namun, tantangan muncul ketika kebutuhan fiskal yang tinggi tidak seimbang dengan kapasitas fiskal, sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi krusial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan drastis pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara fleksibel dan responsif (Kurniawan et al., 2024). Di Kabupaten Klaten, meskipun sempat menunjukkan tren positif sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi tetap fluktuatif dan tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif, efisien, dan berbasis data agar pemerintah daerah mampu menjawab tuntutan pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal secara berkelanjutan (Sinurat, 2018). Ketidakstabilan ini membuat penulis ingin untuk melakukan analisis komparasi Peta

Kapasitas Fiskal Daerah dengan *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) yang terdiri dari beberapa indikator dan dimensi yang fokusnya pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengolahan datanya. Kelebihan dari analisis menggunakan *Fiscal Trend Monitoring System* adalah dari segi indikator yang digunakan sangat rinci dan sudah menggambarkan keadaan dari keuangan suatu daerah (Ritonga, 2014)

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berikut terdapat data yang telah penulis himpun mengenai Peta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Klaten tahun 2019-2023:

Tabel 1.

Peta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Klaten

TAHUN	INDEKS KFD	KATEGORI KFD
2019	1,064	SEDANG
2020	1,238	TINGGI
2021	1,026	SEDANG
2022	1,081	SANGAT RENDAH
2023	0,925	SANGAT RENDAH

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan

Pada tahun 2020, Kabupaten Klaten mengalami ketidakstabilan kapasitas fiskal akibat pandemi Covid-19, meskipun sebelumnya pada tahun 2019 berada dalam kategori sedang dengan indeks kapasitas fiskal 1,064. Dampak pandemi menyebabkan penurunan pendapatan di banyak daerah, termasuk Klaten, namun pemerintah daerah berhasil mengelola PAD dan dana transfer secara efektif sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan belanja publik. Meski kapasitas fiskal masih berada di kategori sedang, upaya pemulihan dilakukan melalui optimalisasi PAD. Penurunan indeks kapasitas fiskal pada 2022–2023 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketergantungan pada dana transfer, pengelolaan keuangan yang kurang efisien, serta tingginya beban belanja. *Their analyses and assessments of fiscal policy help clear the smokescreens (intentional or not) often surrounding the public debate about government budgets, including the adequacy of the fiscal stance and the sustainability of public finances* (Beetsma et al., 2019). Pernyataan dari Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD menegaskan pentingnya pemenuhan target PAD agar daerah memiliki keleluasaan dalam membiayai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas fiskal membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih baik dan diversifikasi sumber pendapatan. Secara keseluruhan, kondisi fiskal Klaten dari 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan tantangan sekaligus upaya perbaikan dalam mencapai kemandirian fiskal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama penulis menggunakan referensi dari karya tulis ilmiah dari (Priyono et al., 2020) yang berjudul Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) di Kota Magelang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti terdahulu menggunakan Sembilan indikator faktor keuangan satu indikator lingkungan dan dari data yang dihasilkan dalam sektor keuangan atau faktor keuangan terdapat tiga indikator memiliki tren yang bagus dan hanya terdapat satu indikator yang tidak bagus. Penelitian kedua berjudul menggunakan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Model Sistem Pemantauan Trend Keuangan (SPTK) dari (Laksmiwati, N. K. S., & Yudianto, 2013). Pendekatan kualitatif deskriptif dengan

menganalisis data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menilai kondisi keuangan Pemda Badung selama tahun 2018–2022. Penelitian ini menghitung kondisi keuangan daerah berdasarkan tiga dimensi dan lima belas indikator. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologi yang sama, yaitu analisis deskriptif berbasis data sekunder dari laporan keuangan daerah. Referensi ketiga berjudul Kondisi Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia dari (Purwanto, 2016) bertujuan mengembangkan model pengukuran kondisi keuangan daerah di Indonesia dengan mengaplikasikan metode FTMS. Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan model yang mengukur keuangan pemerintah dengan pendekatan komprehensif. Metode FTMS digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan secara menyeluruh, mencakup berbagai indikator. Persamaannya dengan penelitian lainnya adalah dalam penggunaan metode FTMS untuk menilai kesehatan fiskal pemerintah daerah. Namun, perbedaannya terletak pada jumlah indikator yang diteliti, di mana penelitian ini menggunakan sembilan indikator setelah melalui uji KMO dan Bartlett, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan jumlah indikator yang lebih banyak dan tidak melalui proses validasi indikator secara statistik. Penelitian keempat penulis dapat dari (Condition, 2009) dengan hasil berupa pengaplikasian model pengukuran keuangan yang berdasar pada Metode FTMS. Referensi penelitian kelima penulis dapat dari (Karisma et al., 2022) yang berjudul Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri No 19 Tahun 2020 dengan hasil berupa tinjauan keuangan berdasarkan indikator solvabilitas operasional, jangka pendek, dan jangka panjang masih tidak signifikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian (Priyono et al., 2020) menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif sedangkan pada penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena penulis menggunakan metode *mixed methods* pendekatan analisis statistik deskriptif dan penulis lebih memfokuskan pada dimensi yang dipakai dimana pada dimensi tersebut penulis menambahkan dimensi faktor lingkungan yang menurut teori yang dijelaskan oleh (Ritonga, 2014) terdapat dimensi yang tidak hanya fokus terhadap faktor keuangan. Jadi, dalam penelitian yang ditulis ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintahan daerah yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) dapat memberikan gambaran kapasitas fiskal yang lebih riil dibandingkan dengan pemantauan melalui Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), yang cenderung hanya menggambarkan posisi fiskal relatif dalam satu tahun anggaran tanpa memperhatikan tren dan dinamika keuangan daerah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kondisi kekuatan keuangan Kabupaten Klaten apabila dievaluasi menggunakan metode FTMS dalam kaitannya dengan kemampuan daerah dalam merespons tuntutan masyarakat, khususnya dalam mencapai target pendapatan yang lebih tinggi dan mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang utuh dan

mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Sesuai pendapat (Creswell & Creswell, 2018), metode campuran memberikan pemahaman lebih lengkap dibanding penggunaan satu jenis data saja. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menyajikan data sosial dan ekonomi Kabupaten Klaten secara sistematis, sehingga tren dan pola perkembangan indikator dapat terlihat jelas tanpa perlu melakukan uji inferensial.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat terkait, serta data sekunder yang berasal dari dokumentasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2019–2023. Informan dalam penelitian ini dipilih secara cermat, terdiri dari 6 orang yang memiliki pemahaman mendalam dan relevan terhadap permasalahan penelitian, serta mampu memberikan informasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi, serta didukung oleh observasi sebagai pelengkap (Agustianti et al., 2022).

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles, 1994). Kodifikasi dilakukan dengan menandai dan mengelompokkan informasi penting dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau matriks agar memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah berdasarkan interpretasi hasil temuan. Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi) serta dari berbagai sumber informasi, sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Gambaran Kapasitas Fiskal menggunakan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dengan *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS)

Secara umum, Pemerintah Provinsi yang memiliki IKFD rendah maka sebagian besar kabupaten/kota di wilayahnya memiliki IKFD yang rendah pula. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Bagi provinsi yang memiliki IKFD tinggi, tidak serta merta sebagian besar kabupaten/kota di wilayahnya memiliki IKFD yang tinggi pula. Faktor yang paling mempengaruhi Peta Kapasitas Fiskal bagi daerah provinsi adalah PAD dan DBH. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang menjadi bagian provinsi dalam struktur APBD digolongkan sebagai Lain-lain Pendapatan, dimana akun tersebut tidak menjadi Faktor Pengurang dalam Peta Kapasitas Fiskal.

Tabel 2.
Perhitungan Indeks Peta Kapasitas Fiskal Daerah

TAHUN	[PAD + DBH + DAU + Otsus + Dana Keistimewaan + TPG/Tamsil]	[Dana Transfer Khusus (DTK), Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Bagi Hasil, Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)]	Belanja Pegawai
-------	---	--	-----------------

2019	3.072.262.254.095,72	2.018.400.087.936,00	1.089.951.573.950
2020	2.986.823.538.902,28	1.882.296.678.154,00	1.046.020.322.799
2021	3.010.627.457.383,28	1.463.705.969.607,00	191.337.724.870
2022	3.081.446.981.551,28	1.639.904.972.121,00	298.787.560.123
2023	3.202.485.511.577,00	1.521.429.422.275,00	130.129.911.709

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$$KFD \text{ Kab. Klaten } 2019 = \frac{[3.072.262.254.095,72] - [2.018.400.087.936,00]}{1.089.951.573.950} = 0,97$$

$$KFD \text{ Kab. Klaten } 2020 = \frac{[2.986.823.538.902,28] - [1.882.296.678.154,00]}{1.046.020.322.799} = 1,06$$

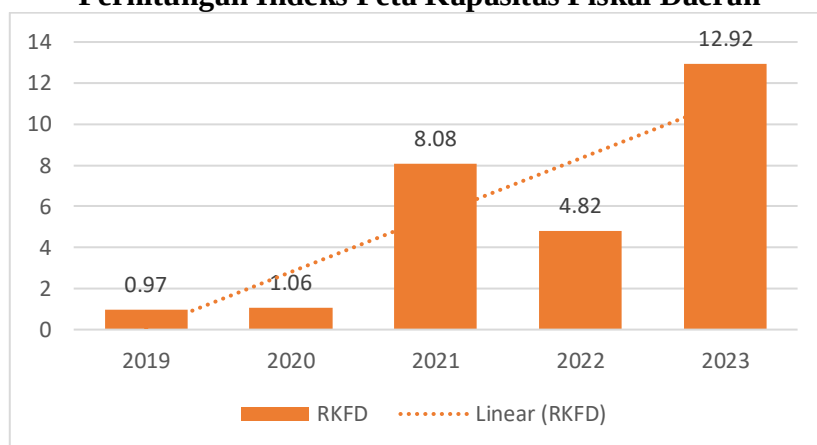
$$KFD \text{ Kab. Klaten } 2021 = \frac{[3.010.627.457.383,28] - [1.463.705.969.607,00]}{191.337.724.870} = 8,08$$

$$KFD \text{ Kab. Klaten } 2022 = \frac{[3.081.446.981.551,28] - [1.639.904.972.121,00]}{298.787.560.123} = 4,82$$

$$KFD \text{ Kab. Klaten } 2023 = \frac{[3.202.485.511.577,00] - [1.521.429.422.275,00]}{130.129.911.709} = 12,92$$

Hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KFD) Kabupaten Klaten dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, nilai KFD berada pada angka 0,97, yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih rendah dan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mulai membaik di tahun 2020, di mana nilai KFD naik tipis menjadi 1,06, menandakan awal kemandirian fiskal meskipun masih dalam taraf yang terbatas.

Grafik 3. 1
Perhitungan Indeks Peta Kapasitas Fiskal Daerah



Sumber : Diolah oleh penulis (2025)

Grafik yang ditampilkan menggambarkan perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dari tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan adanya fluktuasi namun secara umum mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 3.
Summary Perbandingan Kategori IKFD yang terdiri dari PAD, DTK, DBH, DAU, dan BP Kabupaten Klaten

TAHUN	KATEGORI	PAD	DTK	DBH	DAU	BP
2019	SEDANG	106,49	89,29	58,06	100,09	81,75
2020	TINGGI	133,83	100,06	102,47	99,28	88,79
2021	SEDANG	113,45	87,64	133,23	100	84,03
2022	SANGAT RENDAH	108,79	87,58	109,83	100,23	76,37
2023	SANGAT RENDAH	103,87	96,29	112,30	101,66	88,22

Sumber : Diolah oleh Penulis (2025)

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi kategori dari tahun ke tahun, beberapa indikator seperti DBH dan DAU menunjukkan tren kenaikan, terutama setelah tahun 2020. Sementara itu, BP mengalami fluktuasi namun berada dalam kisaran stabil, dan kategori SANGAT RENDAH muncul dalam dua tahun terakhir meski nilai-nilai beberapa indikator cukup tinggi. Sedangkan untuk mengetahui gambaran perbandingan kapasitas fiskal dengan metode *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) yang dipopulerkan oleh (Ritonga, 2014) untuk mengetahui kondisi keuangan yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah.

Tabel 4.
Rangkuman Analisis FTMS Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

No.	Dimensi	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Tren
1.	Pendapatan	Pendapatan Per Kapita	2.030.033,00	2.194.184,30	2.130.149,20	2.025.663,10	2.061.315,90	BAIK
		Pendapatan Pajak	125 Miliar	116 Miliar	126 Miliar	146 Miliar	165 Miliar	BAIK
		Surplus(Defisit) Pendapatan	0,0026	0,0128	0,0298	0,0232	-0,0639	BAIK
2.	Belanja	Belanja Per Kapita	1.447.705,00	1.549.246,00	1.509.017,00	1.466.855,00	2.193.085,00	TIDAK BAIK

		Belanja Per Fungsi	0,24	0,23	0,31	0,31	0,26	TIDAK BAIK
		Belanja Tetap	0,57	0,57	0,55	0,52	0,34	BAIK
3.	Posisi Operasi	Surplus(Defisit) Operasional	0,058	-0,023	0,022	0,009	0,033	TIDAK BAIK
		Posisi Operasional Pemda	13.1 Miliar	7.3 Miliar	5.5 Miliar	8.4 Miliar	11.7 Miliar	BAIK
		Likuiditas	24,55	18,43	52,83	39,29	20,03	BAIK
4.	Struktur Hutang	Hutang Jangka Pendek	0,005	0,008	0,003	0,004	0,005	TIDAK BAIK
		Hutang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	BAIK
5.	Kondisi Aktiva Tetap	Belanja Modal	0,11	0,51	0,62	0,80	0,96	BAIK
6.	Kebutuhan Masyarakat dan Sumber Daya	Jumlah Populasi	1.174.986	1.260.506	1.267.272	948.456	1.284.386	TIDAK BAIK
		Kepadatan Penduduk	1.792	1.922,79	1.933,11	1.946,2	1831	BAIK
		Umur	0,29	0,26	0,25	0,24	0,23	BAIK
		Pengangguran	22.686	34.992	34.524	28.058	28.740	TIDAK BAIK
		Rumah Tangga Miskin	144.100	151.830	158.230	144.870	144.430	TIDAK BAIK

Sumber : diolah oleh FTMS (2025)

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat enam dimensi dan tujuh belas indikator yang sudah dianalisis. Sepuluh indikator sudah pada kondisi baik ditandai dengan warna hijau sedangkan indikator lainnya yang berjumlah tujuh indikator menunjukkan kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan hasil analisis yang sudah dilakukan penulis telah dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan di Pemda Klaten sudah cukup baik.

3.2. Kondisi Kekuatan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Apabila Dianalisis Menggunakan Metode FTMS

Kondisi keuangan Kabupaten Klaten berdasarkan analisis metode *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dan stabil dalam mendukung pengelolaan APBD. FTMS memberikan gambaran menyeluruh terhadap berbagai aspek keuangan, seperti pendapatan, belanja, operasional, struktur utang, aktiva tetap, serta kebutuhan masyarakat. Pendapatan daerah menunjukkan tren positif, terutama pada peningkatan pendapatan per kapita dan pajak daerah. Namun, belanja masih menunjukkan ketidakefisienan dalam alokasinya. Posisi operasi meningkat, meskipun likuiditas dan surplus operasional mengalami fluktuasi. Struktur utang terkendali, dan belanja modal meningkat sebagai indikasi investasi jangka panjang. Di sisi lain, tantangan sosial seperti angka pengangguran dan fluktuasi jumlah penduduk masih perlu perhatian serius. Dengan demikian, meskipun secara umum kondisi keuangan cukup baik, diperlukan peningkatan efisiensi belanja dan strategi pembangunan yang lebih inklusif. FTMS terbukti memberikan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah, sehingga keduanya sebaiknya digunakan secara terpadu dalam perumusan kebijakan fiskal yang strategis dan responsif di Kabupaten Klaten.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan apabila dibandingkan dengan (Priyono et al., 2020) memiliki hasil yang jauh berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sembilan indikator keuangan dan satu indikator lingkungan yang digunakan, tiga indikator keuangan menunjukkan tren positif, sementara satu indikator menunjukkan tren negatif. Berdasarkan analisis menggunakan metode *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Klaten secara umum dinilai cukup baik dan stabil dalam mendukung pengelolaan APBD. Dari enam dimensi dan 17 indikator yang dianalisis, 10 indikator menunjukkan kondisi baik, sedangkan tujuh lainnya perlu perhatian lebih lanjut, terutama pada aspek belanja, hutang jangka pendek, dan isu sosial seperti pengangguran. Dibandingkan dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang hanya menggunakan beberapa rasio keuangan, FTMS memberikan gambaran lebih komprehensif karena menganalisis tren dan efisiensi pengelolaan keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, kombinasi kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk menyusun kebijakan fiskal yang strategis, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Klaten.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) memberikan gambaran kapasitas fiskal yang lebih riil dan menyeluruh dibandingkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), karena FTMS tidak hanya menilai besaran fiskal, tetapi juga mencerminkan stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah melalui indikator kuantitatif dan tren kinerja. Di Kabupaten Klaten, FTMS menunjukkan tren positif dalam pendapatan per kapita dan pajak daerah, serta peningkatan belanja modal yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan. Meskipun masih terdapat tantangan, seperti pengangguran dan hutang jangka pendek, secara umum kondisi keuangan daerah dinilai cukup baik. *The subject of the study is the instruments of state fiscal regulation aimed at encouraging organizations to reduce the negative impact on the environment* (Beetsma et al., 2019). KFD tetap relevan sebagai alat perbandingan fiskal antar daerah dalam satu tahun anggaran, namun FTMS lebih tepat untuk evaluasi jangka menengah-panjang dan penentuan strategi peningkatan PAD yang berkelanjutan. Pendekatan integratif antara kedua metode diperlukan agar perencanaan fiskal lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, mengenai Analisis Keuangan Dengan Metode *Fiscal Trend Monitoring System* terkait dengan adanya keterbatasan dalam memperoleh data sekunder dimana peneliti hanya memperoleh data dalam lima tahun terakhir yaitu 2019-2023

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih ada beberapa kekurangan sehingga penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara memperbanyak data yang ada dalam beberapa tahun kebelakang serta menambah indikator-indikator yang mungkin belum bisa diolah secara komprehensif. Bagi penulis selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber data atau referensi untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih terkini dan lengkap.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten beserta jajaran yang telah memberikan izin kepada penulis dalam

melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., & Himawan, I. S. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=giKkEAAAQBAJ>
- Beetsma, R., Debrun, X., Fang, X., Kim, Y., Lledó, V., Mbaye, S., & Zhang, X. (2019). Independent fiscal councils: Recent trends and performance. *European Journal of Political Economy*, 57, 53–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.07.004>
- Condition, E. F. (2009). *Financial trends monitoring system*.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr
- Herdiana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.610>
- Karisma, Maslichah, & Afifudin. (2022). Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri No 19 Tahun 2020 (Studi Kasus Kota Probolinggo Tahun 2017-2020). *E-Jra*, 11(11), 76–89. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/download/15581/11798>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825>
- Laksmiwati, N. K. S., & Yudianto, I. (2023). (2013). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). *Jurnal Riset Akuntansi*. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/Index.Php/JURA/Article/View/897%0Ahttps://jurnal.itbsemarang.ac.id/Index.Php/JURA/Article/Download/897/838>, 1–19. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JURA/article/view/897%0A>
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis*.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., Bharata, R. W., & Arifah, S. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Di Kota Magelang. *Journal of Public and Business Accounting*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.31328/jopba.v1i2.114>
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.198>
- Ritonga, I. T. (2014). Developing a Measure Of Local Government's. *Journal Of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164.

Sinurat, M. (2015). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung, *Pustaka Rahmat*.

Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: *Ghalia Indonesia*.

Yun, P., Jia, L., Jie Xin, Y., Du Fen, S., Yu Wen, C., Hong Wei, L., Zhao, Z., & Feng, G. (2020). Indonesia's New Petroleum Fiscal Regime: Fiscal Changes, Impacts and Future Trends. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 446(5).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/446/5/052078>

